



***PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GELORA INDONESIA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB SUMBAWA  
PENYAMPAIAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP TAHUN 2026***

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT***
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK***
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026***
- 4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK***
- 5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA***

***DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN SUMBAWA***

***MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2026  
TANGGAL 30 APRIL 2026***

***DISAMPAIKAN OLEH  
ABRON ISHAK, AMD***

***FRAKSI PARTAI GELORA INDONESIA  
DPRD KABUPATEN SUMBAWA***



## ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

1. YTH.BUPATI SUMBAWA DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
2. YTH.PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
3. YTH. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
4. YTH. SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN,KEPALA PADA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA.KEPALA DINAS,KEPALA BADAN,PARA CAMAT DAN LURAH Se-KABUPATEN SUMBAWA
5. PIMPINAN PARTAI POLITIK, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH WANITA DAN TOKOH PEMUDA, INSAN PERS SERTA PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN,SINGKATNYA HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

*SEBAGAI AWAL PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI GELORA KABUPATEN SUMBAWA, SENANTIASA MENGHARAP RIDHO DAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, PERKENANKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN SIDANG DEWAN YANG BERBAHAGIA UNTUK MENYAMPAIKAN RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, YANG TELAH MEMBERIKAN RAHMAT DAN KARUNIANYA YANG BEGITU BESAR SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERSAMA-SAMA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT INI DALAM KEADAAN SEHATV WALAFIAT*

*SHOLAWAT SERTA SALAM, MARILAH KITA SAMPAIKAN KEPADA JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SALLALLAHU ALAIHI WASSLAM, YANG TELAH MEMBERIKAN KITA PETUNJUK DAN HIDAYAH SEHINGGA KITA DAPAT BERFIKIR DAN BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT SUMBAWA TAU DAN TANA SAMAWA TERCINTA .*

*PADA KESEMPATAN INI PULA IZINKAN SAYA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI TINGGINYA KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI FRAKSI GELORA KABUPATEN SUMBAWA UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 5 ( LIMA ) RANCANGAN PERATURAN DAERAH ( RANPERDA ) TAHUN 2026 YANG DIHARAPKAN NANTINYA DAPAT MENJADI LANDASAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SELANJUTNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*

### **RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

SECARA UMUM FRAKSI GELORA INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA BERPANDANGAN BAHWA MELIHAT DARI PERUBAHAN DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT YANG SANGAT PESAT SEIRING DENGAN KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI .MENGAKIBATKAN PERLU ADANYA PENYESUAI PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA SEBAGAI AKTOR YANG MEMILIKI LEGITIMASI DAN DUKUNGAN SUMBER DAYA GUNA MENYESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN

DALAM PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI GELORA INDONESIA SECARA MENDETAIL UNTUK MASING – MASING RANPERDA ,FRAKSI KAMI AKAN MENYAMPAIKAN CATATAN DAN MASUKAN SECARA UMUM TERHADAP 5 ( LIMA ) RANPERDA TERSEBUT

#### **1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKATSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIPERLUKAN SUATUN KONDISI YANG TENTRAM ,TERTIB DAN TERLINDUNGI.UNTUK MENCIPTAKANN KABUPATEN SUMBAWA YANG DINAMIS ,AMAN,NYAMAN,TERTIB DAN KONDUSIFDN MENUMBUHKAN RASA DISIPLIN DALAM BERPRILAKU BAGI SETIAP WARGA MASYARAKAT DIPERLUKAN ADANYA UPAYA DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUMDAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATNYA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENGATUR BAHWA KETENTRAMAN ,KETERTIBAN UMUM SERTA

PERLINDUNGAN MASYARAKAT MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAH BAIK YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH. BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT PERLU MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGANNYA

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT PEMERINTAH DAERAH DIHARAPKAN SERIUS DAN BERKOMITMEN MENCIPTAKAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEBAGAI MANA DIMAKSUD BERTUJUAN UNTUK :

1. MEWUJUDKAN BUDAYA TERTIB, TERATUR DAN DISIPLIN MASYARAKAT
2. MEMBERI RASA AMAN, TENTRAM DAN NYAMAN PADA MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN SETIAP KEGITANNYA
2. MENJADI DASAR HUKUM DAN PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM MENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FRAKSI PARTAI GELORA INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA BEROENDAPAT BAHWA PRINSIP PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BERLANDASKAN PADA HAK ASASI MANUSIA DENGAN TETAP MENGEDAPKAN PRINSIP PRINSIP UMUM DAN KHUSUS SEBAGAIMANA :

- A. MENJUNJUNG TINGGI MORALITAS, ADAT ISTIADAT DAN PERATURAN LAIN YANG BERLAKU
- B. MENJAMIN HAK UTMUK HIDUP KEBEBASAN DAN KEAMANAN INDIVIDU SEBAGAI DIJAMN DALAM DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA DAN KONVENAN HAK HAK SIPIL DAN POLITIK
- C. MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT

#### **SEDANGKAN PRINSIP KHUSUS SEBAGAI BERIKUT**

- A. MENINGKATKAN SEMANGAT KERJA DAN PROFISIONALISME SECARA TERUS MENERUS
- B. MENGHINDARI PENGGUNAAN KEKERASAN
- C. MELAPORKAN SETIAP PERUSTIWA UNTUK KEMUDIAN DILAKUKAN LANGKAH LANGKAH SESUIA DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

#### ***RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT***

DARI URAIAN INDI ATAS FRAKSI GELORA INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA POIN YANG DAPAT DIOERHATI AKNA OLEH PEMERINTAH

- PENEGAKAN HUKUM DAN SAKSI  
MENEKANKAN AGAR SAKSI YANG DIATUR DALAM RAPERDA BERSIFAT PROPOSIONAL EDUKATIF DAN TIDAK BERLEBIHAN NAMUN TETAP TEGAS
- PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
FOKUS UTAMA ADALAH MENCIPTAKAN KEADAAN DINAMIS AMAN, TERTIB DAN TERATUR AGAR AKTIVITAS SOSIAL EKONOMI BERJALAN LANCAR
- LANDASAN HUMANIS

MENDORONG PENYESUAI ATURAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

PADA DASARNYA FRAKSI GELORA MENYETUJUI PEMBUATAN PERDA BERKAITAN DENGAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

## **2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

FRAKSI GELORA MENILAI BAHWA RANPERDA INI SEJALAN DENGAN VISI BESAR KITA UNTUK MENYIAPKAN GENERASI EMAS KABUPATEN SUMBAWA. KAMI MENGAPRESIASI BERBAGAI PROGRAM YANG TELAH BERJALAN, SEPERTI FORUM ANAK, PUSPAGA, DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA), SERTA CAPAIAN PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK PRATAMA TAHUN 2024.

NAMUN, FRAKSI GELORA MELIHAT MASIH ADA TANTANGAN SERIUS YANG HARUS DIJAWAB, ANTARA LAIN:

KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MASIH TINGGI DAN BUTUH PENANGANAN LEBIH TEGAS. MASIH TINGGINYA ANGKA PERKAWINAN ANAK DAN STANTING YANG MENGHAMBAT KUALITAS GENERASI MUDA DAN MASIH LEMAHNYA /BELUM OPTIMAL INTEGRASI PROGRAM ANTAR OPD SEHINGGA KLA CENDERUNG BERJALAN PARSIAL

MASUKAN DAN REKOMENDASI FRAKSI GELORA

### **1. PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA**

RANPERDA INI HARUS MEMBERIKAN PERHATIAN LEBIH PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA, TERMASUK PELATIHAN PARENTING, DUKUNGAN EKONOMI KELUARGA, DAN KONSELING KELUARGA.

### **2. PARTISIPASI ANAK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN**

PEMERINTAH HARUS MEMBERIKAN RUANG BAGI ANAK DAN REMAJA UNTUK BERPARTISIPASI AKTIF DALAM PEMBANGUNAN, MISALNYA MELALUI FORUM ANAK YANG DIFUNGSIKAN LEBIH STRATEGIS.

### **3. DIGITALISASI LAYANAN KLA**

PERLU DIKEMBANGKAN APLIKASI ADUAN RAMAH ANAK, SISTEM INFORMASI MONITORING KLA, SERTA PLATFORM EDUKASI DIGITAL UNTUK ANAK DAN KELUARGA.

### **RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

DENGAN PERTANYAAN, TANGGAPAN, DAN MASUKAN TERSEBUT, DARI SEMUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA MASING MASING KOMISI DI DPRD KAB SUMBAWA UNTUK DI JADIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 FRAKSI PARTAI GELORA PADA PRINSIPNYA MENDUKUNG RANPERDA DEMI MEWUJUDKAN VISI MISI EMAS UNTUK GENERASI SUMBAWA YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK MULIA, DAN SIAP MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN

## **3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU DARI LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, SELAIN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN, PENGADAAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, PENILAIAN, PEMUSNAHAN, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN DAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK DIPERLUKAN BAGI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIPINDAHTANGANKAN

.

### **BENTUK PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MELIPUTI:**

#### **1. PENJUALAN**

PENJUALAN ADALAH PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH KEPADA PIHAK LAIN DENGAN MENERIMA PENGANTIAN DALAM BENTUK UANG

#### **2. TUKAR MENUKAR**

TUKAR MENUKAR ADALAH PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH, ANTAR PEMERINTAH DAERAH, ATAU ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LAIN,

DENGAN MENERIMA PENGGANTIAN UTAMA DALAM BENTUK BARANG, PALING SEDIKIT DENGAN NILAI SEIMBANG<sup>5</sup>

### 3. HIBAH

HIBAH ADALAH PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH, ANTAR PEMERINTAH DAERAH, ATAU DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN, TANPAMEMPEROLEH PENGGANTIAN<sup>6</sup>

### 4. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ADALAH PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH YANG SEMULA MERUPAKAN KEKAYAAN YANG TIDAK DIPISAHKAN MENJADI KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN UNTUK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI MODAL/SAHAM DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, ATAU BADAN HUKUM LAINNYA YANG DIMILIKI NEGARA

.PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENDIRIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH ATAU BADAN HUKUM LAINNYA YANG DIMILIKI NEGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DILAKUKAN DENGAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT:

A. BARANG MILIK DAERAH YANG DARI AWAL PENGADAANNYA SESUAI DOKUMEN PENGANGGARAN DIPERUNTUKKAN BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH ATAU BADAN HUKUM LAINNYA YANG DIMILIKI NEGARA DALAM RANGKA PENUGASAN PEMERINTAH; ATAU

B. BARANG MILIK DAERAH LEBIH OPTIMAL APABILA DIKELOLA OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH ATAU BADAN HUKUM LAINNYA YANG DIMILIKI NEGARA BAIK YANG SUDAH ADA MAUPUN YANG AKAN DIBENTUK

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU DARI LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, SELAIN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN, PENGADAAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN, DAN PEMELIHARAAN, PENILAIAN, PEMUSNAHAN, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN DAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

DASAR PEMINDAHTANGANAN BMD ADALAH :

- A. PENJUALAN;
- B. TUKAR MENUKAR;
- C. HIBAH;
- D. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERA

### **SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT**

FRAKSI GELORA MENEKNNKAN PADA EVALUASI KINERJA ,TRANSPARANSI PROFIT ( KEUNTUNGAN) UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN FINANSIAL BUMD BUKAN SEKEDAR MEMBEBANI APBD.PENINGKATAN MODAL HARUS SEJALAN DENGAN PERBAIKAN TATA KELOLA,EVALUASI MENYELURUH DAN MEMATUHHUI REGULASI YANG ADA.TERMASUK MEMINTA DAN MENYAMPAIKAN KEPADA DPRD YANG TELAH DIBERIKAN PERYERTAAN MODAL. MEKANISME APA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MEMASTIKAN BAHWA BUMD DALAM PENGELOLAAN DANA ..KAMI MEMINTA TRANSFARANSI PENUH DARI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENYERTAAN MODAL YANG MANA TIDAK DILENGKAPI DENGAN ANAALISA ROI ( RETURN ON INVESTMENT) , RESIKO KERUGIAN TIDAK DI JELASKAN,DAN TETAPKAN TARGET KONSTRIBUSI PAD BAHKAN HASIL AUDIT TERKAT DENGAN LAPORAN SECARA MENDETAIL.

#### **4.RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

FRAKSI PARTAI GELORA MEMANDANG BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK MERUPAKAN BAGIAN DARI UPAYA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.

SEBAGAIMANA DITEGASKAN DALAM KONSIDERAN RANPERDA, PENINGKATAN VOLUME AIR LIMBAH DOMESTIK BERPOTENSI MENIMBULKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SERTA BERDAMPAK PADA PENURUNAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT .OLEH KARENA ITU, FRAKSI PARTAI GELORA PADA PRINSIPNYA MENDUKUNG RANPERDA INI UNTUK DIBAHAS LEBIH LANJUT, DENGAN SEJUMLAH CATATAN KRITIS DAN KONSTRUKTIF. PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GELORA

##### **1. KESENJANGAN ANTARA KEWAJIBAN DAN KESIAPAN DAERAH**

RANPERDA INI MENGATUR KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK,

TERMASUK PENGGUNAAN SISTEM SETEMPAT (SPALD-S) DAN LAYANAN PENYEDOTAN LUMPUR TINJA. NAMUN FRAKSI PARTAI GELORA MENILAI:KEWAJIBAN TERSEBUT BELUM SEPENUHNYA DIIMBANG ENGAN KESIAPAN LAYANAN PUBLIK INFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN LUMPUR INJA MASIH TERBATAS

##### **2. KESIAPAN INFRASTRUKTUR IPLT DAN SPALD**

RANPERDA MENEGASKAN BAHWA SELURUH LUMPUR TINJA HARUS DIOLAH MELALUI INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT).FRAKSI PARTAI GELORA MEMPERTANYAKAN:APAKAH KAPASITAS IPLT SAAT INI MAMPU MENAMPUNG SELURUH KEBUTUHAN DAERAH?

##### **3. BEBAN PEMBIAYAAN DAN KEADILAN SOSIAL**

RANPERDA MEMBUKA RUANG PEMBIAYAAN YANG MELIBATKAN MASYARAKAT,HARUS ADA SKEMA TARIF YANG ADIL DAN TRANSPARAN WAJIB ADA PERLINDUNGAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.PADA PRINSIPNYA KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK BOLEH MENAMBAH BEBAN RAKYAT TANPA SOLUSI.

##### **4. KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA**

RANPERDA MENGATUR PERAN PEMERINTAH, BUMD, SWASTA, DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN SPALD.FRAKSI MELIHAT POTENSITUMPANG TINDIH KEWENANGAN LEMAHNYA KOORDINASI ANTAR LEMBAGA KAMI MENEKANKAN PENTINGNYA,PENETAPAN OPERATOR UTAMA YANG JELAS DAN SISTEM PENGAWASAN YANG AKUNTABEL

##### **5. PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM**

RANPERDA MEMUAT KETENTUAN SANKSI BAGI PELANGGARAN.PENEGAKAN HUKUM HARUS BERTAHAP

EDUKASI MASYARAKAT HARUS MENJADI PRIORITAS UTAMA PENDEKATAN YANG KAMI DORONG:

> EDUKASI → PEMBINAAN → PENEGAKAN HUKUM

##### **6. PARTISIPASI MASYARAKAT MASIH LEMAH**

RANPERDA TELAH MENGATUR PERAN SERTA MASYARAKAT, NAMUN MASIH BERSIFAT NORMATIF KAMI MENDORONG SKEMA INSENTIF BAGI MASYARAKAT YANG PATUH PELIBATAN AKTIF KOMUNITAS DALAM PENGELOLAAN SANITASI.

BERANGKAT DARI PERMASALAHAN RANPERDA DIATAS MAKA FRAKSI GELORA INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA MEMPERTANYAKAN :

1. BAGAIMANA ROADMAP PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN IPLT DI KABUPATEN SUMBAWA
2. APAKAH TELAH TERSEDIA PETA LAYANAN SPALD BERBASIS WILAYAH HINGGA DESA
3. BAGAIMANA SKEMA TARIF LAYANAN AGAR TETAP TERJANGKAU MASYARAKAT KECIL
4. SIAPA OPERATOR UTAMA SPALD DAN BAGAIMANA MEKANISME PENGAWASANNYA
5. APA INDIKATOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI RANPERDA INI DALAM JANGKA MENENGAH

**5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN FRAKSI GELORA MENDORONG AGAR PENATAAN PERANGKAT DAERAH TIDAK HANYA FORMALITAS, TETAPI BENAR-BENAR MENGHASILKAN STRUKTUR YANG EFISIEN, MENGURANGI BIROKRASI YANG BERBELIT, DAN MEMASTIKAN PROGRAM PEMBANGUNAN LEBIH TEPAT SASARAN.

PENYESUAIAN DENGAN URUSAN KEWENANGAN: STRUKTUR YANG DIBENTUK HARUS BERDASARKAN ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH, POTENSI UNGGULAN, DAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB/PILIHAN, BUKAN SEKADAR MEMBAGI JABATAN.

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN DIGITALISASI: ADANYA SOROTAN KUAT MENGENAI PENTINGNYA TRANSFORMASI DIGITAL (E-GOVERNMENT) DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENGARSIPAN UNTUK TRANSPARANSI SERTA PERCEPATAN PELAYANAN. FOKUS PADA PELAYANAN DASAR DAN ANGGARAN: FRAKSI MEMPRIORITASKAN AGAR PENGGABUNGAN ATAU PEMBENTUKAN OPD BARU TETAP MENGUTAMAKAN PELAYANAN DASAR SEPERTI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, SERTA EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI.

KOMPETENSI SDM: ADANYA SARAN UNTUK MENYIAPKAN SDM YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL (ARSIPARIS, TENAGA TEKNIS) SEIRING DENGAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI.

DARI SEMUA INI AKAN BERDAMPAK PADA OPD ITU SENDIRI YANG MANA KINERJA DAN EFEKTIVITAS MASING MASING OPD BELUM TERUKUR SEHINGGA MENAKIBATKAN TERJADI TUMPANG TINDIH YANG MANA SETIAP KEBIJAKAN HARUS MEMILIKI OPD UTAMADAN DISERTAI DENGAN PEMBAGIAN TUGAS JELAS

UNTUK MENGHINDARI DAN KINERJA DARI PADA OPD YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DARI EVALUASI MENYEKURUH KINERJA OPD BERBASIS OUTPUT DAN MENGHINDARI TERJADINYA PENAMBAHAN STRUKTUR YANG TIDAK EFISIEN YANG DAPAT MENGHAMBAT KINERJA DARI MASING MASING OPD YANG ADA . DARI SEMUA RANPERDA DIATAS DAPAT KAMI SIMPULKAN STRUKTUR RANPERDA MEMILIKI ARAH YANG BAIK ,NAMUN MASIH MEMILIKI KELEMAHAN DALAM :

- KETERUKURAN ,INTEGRITAS PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN SEHINGGA DIPERLUKAN PENGUATAN INDIKATOR INTERITAS KEBIJAKAN DAN KOMITMEN IMPLEMENTASI

***TANPA INDIKATOR YANG JELAS NDAN INTEGRITAS KEBIJAKAN RANPERDA BERPOTENSI HANYA MENJADI DOKUMEN ADMINISTRATIF BUKAN SOLUSI NYATA BAGI MASYARAKAT.***

**HADIRIN PESERTA RAPAT DEWAN YANG KAMI MULIAKAN**

DENGAN PERTANYAAN, TANGGAPAN, DAN MASUKAN TERSEBUT, DARI SEMUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB SUMBAWA UNTUK DI JADIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 FRAKSI PARTAI GELORA PADA PRINSIPNYA MENDUKUNG RANPERDA DEMI MEWUJUDKAN VISI MISI EMAS UNTUK ***GENERASI SUMBAWA YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK MULIA, DAN SIAP MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN.***

DEMIKIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI GELORA INDONESIA KAB.SUMBAWA

*WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,*

SUMBAWA BESAR, 11 September 2025

**FRAKSI GELORA INDONESIA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA**

**KETUA : KAHARUDDIN Z**

**WAKIL KETUA : M TAUFIK**

**SEKRETARIS : SANDI S.Pd.MM**

**ANGGOTA : ABRON ISHAK A.Md**

